

Tahapan Vermin Perbaikan 20 Parpol di Kaltim, Inilah Catatan Hasil Pengawasan Bawaslu

Samarinda, Bawaslu Kaltim- Tahapan verifikasi administrasi (vermin) keanggotaan hasil perbaikan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu Tahun 2024 telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota Se- Kalimantan Timur, sejak 3- 10 Oktober. Sebanyak 20 partai politik (parpol) dinyatakan lolos verifikasi administrasi tahap kedua perbaikan dokumen calon peserta Pemilu 2024 (lihat grafis). Selama tahapan itu, Bawaslu Kabupaten Kota Se- Kaltim telah melakukan pengawasan dan tindakan pencegahan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja KPU Kabupaten/ Kota.

Pencegahan sebagai langkah antisipasi terjadinya pelanggaran, diantaranya dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten/ Kota agar bekerja secara profesional dan bekerja sesuai aturan perundang- undangan. Imbauan juga diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota kepada calon peserta Pemilu 2024 agar memperhatikan tahapan verifikasi administrasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota. Bawaslu Kabupaten/ Kota juga mengingatkan calon peserta Pemilu untuk tidak memasukan data keanggotaan yang dilarang, diantaranya TNI/ Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat BUMN/ BUMD, usia di bawah 17 tahun atau belum menikah, serta keanggotaan ganda.

Terkait Vermin Perbaikan, Bawaslu Kabupaten/ Kota telah melakukan pengawasan dengan dua metode, yakni pengawasan yang bersifat langsung dengan membuat jadwal piket pengawasan setiap hari di Kantor KPU Kabupaten/ Kota. Personelnya Anggota Bawaslu Kabupaten Kota dibantu oleh Staf Sekretariat. Metode lain adalah melakukan pengawasan tidak langsung dengan menganalisis terhadap data- data yang berkaitan dengan tahapan yang sedang berlangsung lewat pencermatan di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Namun demikian, banyak kendala ditemukan Bawaslu Kabupaten/ Kota Se- Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan tahapan verifikasi administrasi perbaikan, baik pengawasan secara langsung di KPU Kabupaten/ Kota maupun pencermatan di SIPOL. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota pada Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang digelar di Kantor Bawaslu Kaltim, Jl. MT Haryono Samarinda, Selasa (11/10/2022). Rapat yang dipimpin oleh Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalimantan Timur, Muhammad Ramli ini dihadiri seluruh Penanggungjawab dan Ketua Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten/ Kota Se- Kalimantan Timur.

Berikut sejumlah catatan Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota Se- Kalimantan Timur selama tahapan vermin perbaikan mulai 3- 10 Oktober 2022.

BAWASLU BALIKPAPAN

- KPU Kota Balikpapan belum melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan pada tgl 1- 3 Oktober 2022 dengan alasan belum mendapatkan data dan arahan dari KPU RI. Namun Tim Pengawasan tetap melakukan pengawasan secara melekat di Kantor KPU Kota Balikpapan. Selanjutnya Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan imbauan nomor 023/PM.00.02/K.KI-08/X/2022 kepada KPU Kota Balikpapan untuk segera melaksanakan verifikasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022;
- Bawaslu Kota Balikpapan melakukan pencermatan melalui SIPOL pada tanggal 03 Oktober 2022 untuk memastikan kesesuaian jadwal verifikasi administrasi. Adapun hasil pencermatan SIPOL yang dilakukan oleh Operator SIPOL atas nama M. Afrizal Arsyad dengan Surat Tugas Nomor:158/PM.00.02/KI08/X/2022 terdapat perubahan jadwal yakni dari tanggal 3- 10 Oktober 2022;
- Hasil pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan pada tanggal 7 Oktober 2022, KPU Kota Balikpapan telah menyelesaikan verifikasi terhadap 20 partai politik dengan total data keanggotaan yang terverifikasi sebanyak 7.256 melalui SIPOL;
- Kendala di lapangan, Tim Pengawas tidak mendapatkan data terkait progres dari verifikasi administrasi perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan setiap harinya sehingga pengawas tidak dapat mengisi alat kerja pengawasan (AKP);
- Selain itu KPU Kota Balikpapan tidak menyampaikan secara detail waktu pelaksanaan vermin perbaikan kepada Bawaslu Kota Balikpapan sehingga pengawas tidak mengetahui secara pasti kapan waktu verifikator SIPOL mulai bekerja dan selesai bekerja.

BAWASLU SAMARINDA :

- Bawaslu Kota Samarinda belum mendapatkan data verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan;
- Tampilan dalam Sipol berubah lagi. Fitur pencarian keanggotaan Parpol menghilangkan kolom pencarian Belum Vermin, MS, BMS dan TMS serta ketika membuka nama keanggotaan dalam Parpol keterangan MS, BMS dan TMS tidak muncul. KTP dan KTA tidak dapat dilihat dan diunduh lagi.

BAWASLU BONTANG :

- Strategi pengawasan secara langsung semua dapat dilakukan dengan baik oleh Bawaslu Bontang terhadap kegiatan vermin perbaikan oleh KPU Bontang. Namun data hasil dari verifikasi perbaikan tidak dapat secara maksimal didapat, baik permintaan data secara langsung kepada KPU Bontang maupun dari pencermatan di SIPOL melalui akun Bawaslu Bontang.
- Tidak adanya data sandingan yang didapat oleh Bawaslu Bontang berdasarkan data terbaru dari SIPOL dengan data yang dilakukan oleh KPU Bontang menjadi kendala untuk menentukan sinkronisasi data.



BAWASLU KUKAR :

- Pengawasan Bawaslu Kukar dalam melakukan pengawasan langsung dapat terlaksana dengan maksimal. Namun dalam proses pengawasan pencermatan tidak dapat dilakukan karena Bawaslu Kukar tidak mendapatkan data pembandingan verifikasi perbaikan yang dimiliki oleh KPU Kukar sehingga menyulitkan dalam melakukan pencermatan;
- Dalam melakukan pengawasan menggunakan SIPOL akun yang ada di Bawaslu Kukar, data yang dimiliki tidak sama dengan data yang dimiliki KPU Kukar. Artinya data yang sudah diinput oleh KPU Kukar tidak menjadi otomatis sama seperti yang ada di SIPOL Bawaslu Kukar.

BAWASLU KUTIM :

- Adapun dalam melaksanakan pengawasan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kutai Timur tidak mendapatkan akses untuk melakukan pengawasan langsung/ melekat dan data terkait hasil pencermatan KPU Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian hasil dari vermin dan vermin perbaikan tidak dapat secara maksimal didapat, baik permintaan data secara langsung maupun dari pencermatan di Sipol;
- Diharapkan KPU Kutai Timur lebih terbuka kepada Bawaslu Kutai Timur terkait data hasil kegiatan di KPU Kutim. Sebab hal tersebut berdampak kepada pelaksanaan pengawasan langsung dan monitoring hasil kegiatan pada setiap tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.

BAWASLU PPU :

- Bahwa KPU Penajam Paser Utara tidak melakukan klarifikasi karena tidak menemukan partai politik yang mengunggah surat pernyataan.

BAWASLU PASER :

- Berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Paser terhadap dugaan keanggotaan ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat partai politik hingga tanggal 9 Oktober 2022 tidak ada partai politik yang respon terhadap keanggotaan;
- Pengawasan Bawaslu Paser terhadap tahapan verifikasi administrasi (vermin) perbaikan partai politik calon peserta Pemilu 2024 terdapat kendala dalam penggunaan SIPOL. Bawaslu Paser mengalami kendala pada tanggal 4- 10 Oktober 2022 tidak dapat melihat status MS, BMS maupun TMS.

BAWASLU BERAU :

- Pengawasan Bawaslu terhadap tahapan verifikasi administrasi (vermin) perbaikan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 menunjukkan bahwa, terdapat kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
- Bawaslu Kabupaten Berau juga mengalami kendala keterbatasan akses pengawasan dalam akses terhadap SIPOL yaitu pada tanggal 4 Oktober 2022 hingga 10 Oktober 2022 Bawaslu Kabupaten Berau tidak dapat melihat status MS, BMS maupun TMS hingga pada mendownload KTP dan/atau KTA Keanggotaan Parpol.



BAWASLU KUBAR :

- Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menyampaikan surat imbauan Nomor 105/PM.00.02/K/KI-02/09/2022 tanggal 28 September 2022 kepada KPU Kabupaten Kutai Barat untuk segera melaksanakan verifikasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022;
- KPU Kabupaten Kutai Barat belum dapat melaksanakan verifikasi administrasi karena gangguan jaringan internet dan juga karena belum mendapatkan data dan arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi Kaltim. Namun Tim Pengawasan tetap melakukan pengawasan secara melekat dari tanggal 1- 3 Oktober 2022;
- Bawaslu Kabupaten Kutai Barat melakukan pencermatan melalui SIPOL dari tanggal 1- 6 Oktober 2022 dan data di dalam aplikasi SIPOL masih dalam proses;
- Pada tanggal 2 Oktober 2022 SIPOL dapat membaca data keanggotaan yang MS, BMS, TMS dan belum vermin. Namun pada tanggal 4 Oktober 2022 terjadi perubahan data status keanggotaan yang MS, BMS, TMS, dan belum vermin. Selanjutnya mulai tanggal 5- 10 Oktober 2022 SIPOL tidak dapat dilihat;
- Tim pengawasan vermin kesulitan mendapat data dari KPU Kabupaten Kutai Barat karena beberapa alasan, antara lain KPU Kabupaten tidak memiliki kewajiban untuk memberikan data kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat;
- Sebagaimana KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat adalah sesama penyelenggara Pemilu di daerah, diharapkan KPU Kabupaten Kutai Barat bisa lebih terbuka kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat terkait data hasil kegiatan di KPU Kabupaten Kutai Barat agar tidak menghambat proses pengawasan.

BAWASLU MAHAKAM ULU :

- Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu terhadap tahapan vermin perbaikan terbilang tidak terlalu terdapat banyak hambatan karena total vermin perbaikan yang dilakukan KPU Kabupaten Mahakam Ulu hanya sebanyak 903 dan hal tersebut dilakukan KPU Kabupaten Mahakam Ulu hanya 1 hari;
- Kendala yang dirasakan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu adalah dalam penggunaan SIPOL. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengalami kendala keterbatasan akses pengawasan terhadap SIPOL yaitu pada tanggal 5- 9 Oktober 2022. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak dapat melihat status MS, BMS maupun TMS hingga pada mengunduh KTP dan/ atau KTA keanggotaan Parpol. (*)

Humas Bawaslu Kalimantan Timur



LAMPIRAN :

No	Nama Partai di Vermin Perbaikan
1	Partai Bulan Bintang (PBB)
2	Partai Buruh
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Demokrat
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
6	Partai Amanat Nasional (PAN)
7	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)
8	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Ummat
11	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12	Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
13	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
14	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
15	Partai Golongan Karya (Golkar)
16	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
18	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
19	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
20	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Kab/Kota	Jumlah Anggota Vermin Perbaikan	MS	TMS
Balikpapan	7256	17679	6135
Samarinda	6654	21337	8697
Kutim	4032	11919	4574
Kukar	6700	2569	4131
Kubar	3170	1313	176
PPU	1713	-	-
Paser	-	-	-
Berau	3815	1842	1973
Bontang	2575	1288	1205
Mahulu	903	315	588

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota Se-Kaltim



Nara Sumber

Nama : Muhammad Ramli
Jabatan : Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalimantan Timur/ Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
No HP/ WA : 081351890127

